

LEMBAGA PENDIDIKAN YANG BERJIWA NASIONAL

Sarmila¹, Tri Andini Putri², Ine Febrianti³, Rina⁴, Revienna Aulia Putri⁵, Mulia Suryani⁶

¹²³⁴⁵⁶Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas PGRI Sumatera Barat

* Corresponding Author: msarmila924@gmail.com¹. muliasuryani@gmail.com²

Abstrak

Pendidikan memiliki peran strategis dalam membentuk karakter bangsa dan menanamkan nilai-nilai nasionalisme, khususnya bagi generasi muda sebagai penerus bangsa. Sejarah pendidikan di Indonesia mencatat peran penting sejumlah lembaga pendidikan berjiwa nasional, baik sebelum maupun sesudah kemerdekaan. Lembaga seperti Taman Siswa, Muhammadiyah, INS Kayu Tanam, dan Diniyah Puteri Padang Panjang tidak hanya menjadi pusat penyebaran ilmu pengetahuan, tetapi juga wadah perjuangan intelektual dan nasionalisme. Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi kontribusi historis serta relevansi nilai-nilai kebangsaan yang diwariskan lembaga-lembaga tersebut dalam sistem pendidikan Indonesia masa kini. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan teknik analisis isi terhadap berbagai literatur dan penelitian terdahulu. Hasil literatur menunjukkan bahwa nilai-nilai nasionalisme yang dahulu diperjuangkan mulai mengalami pergeseran di era modern akibat arus globalisasi dan perkembangan teknologi. Kurikulum Merdeka dinilai belum sepenuhnya mengakomodasi integrasi nilai kebangsaan secara sistematis. Oleh karena itu, penguatan kembali nilai nasionalisme melalui pendidikan karakter berbasis warisan lembaga pendidikan nasional menjadi urgensi. Kesimpulan penelitian ini menegaskan pentingnya revitalisasi nilai-nilai nasionalisme dalam kurikulum agar pendidikan Indonesia tetap berpijak pada identitas bangsa di tengah tantangan global.

Kata Kunci : Lembaga Pendidikan, Kurikulum, Pendidikan Nasional, Kemerdekaan

Abstract

Education holds a strategic role in shaping national character and instilling values of nationalism, particularly for the younger generation as the future leaders of the nation. The history of education in Indonesia records the significant contribution of several national-spirited educational institutions, both before and after independence. Institutions such as Taman Siswa, Muhammadiyah, INS Kayu Tanam, and Diniyah Puteri Padang Panjang not only served as centers for disseminating knowledge but also as platforms for intellectual and nationalist movements. This study aims to explore the historical contributions and contemporary relevance of the national values upheld by these institutions within Indonesia's current education system. The research employs a library research method using content analysis techniques on various literature sources and previous studies. The findings reveal that the spirit of nationalism once promoted through education has gradually weakened in the modern era, largely due to globalization and the rapid advancement of technology. The Merdeka Curriculum has yet to fully integrate nationalist values in a structured and systematic manner. Therefore, reinforcing national values through character education rooted in the legacy of national education institutions is deemed essential. This study concludes that revitalizing nationalism within the national curriculum is crucial to preserving Indonesia's identity amidst the challenges of globalization.

Keywords : Educational Institutions, Curriculum, National Education, Independence

PENDAHULUAN

Pendidikan memegang peran strategis dalam pembentukan karakter bangsa dan menanamkan nilai-nilai nasionalisme kepada setiap warga negara, khususnya generasi muda yang akan menjadi penerus estafet kepemimpinan bangsa di masa depan. Dalam konteks sejarah bangsa Indonesia, lembaga-lembaga pendidikan nasional yang lahir sebelum dan sesudah kemerdekaan berperan sebagai wahana penyebaran ilmu pengetahuan, dan berperan sebagai alat perjuangan serta media pembinaan rasa cinta tanah air. Sejumlah lembaga pendidikan seperti Taman Siswa, Muhammadiyah, INS Kayu Tanam, dan Diniyah Padang Panjang telah membuktikan kontribusinya yang signifikan dalam membangun semangat nasionalisme dan memperjuangkan hak-hak pendidikan bangsa Indonesia di tengah dominasi sistem pendidikan kolonial yang diskriminatif. Penelitian yang dilakukan oleh Susanto (2022) menunjukkan bahwa keberadaan lembaga-lembaga pendidikan bercorak nasional ini mampu membangkitkan kesadaran politik dan sosial masyarakat Indonesia serta menjadi cikal bakal sistem pendidikan nasional yang berjiwa kebangsaan.

Seiring berjalannya waktu dan derasnya arus globalisasi, nilai-nilai nasionalisme yang dahulu diperjuangkan melalui lembaga pendidikan mulai mengalami degradasi, khususnya di kalangan generasi muda. Studi yang dilakukan oleh Shobirin (2025) menyebutkan bahwa perkembangan teknologi informasi, modernisasi gaya hidup, serta paparan budaya asing yang masif telah berdampak pada pergeseran nilai dan melemahnya identitas nasional pelajar Indonesia. Masalah ini menjadi semakin kompleks karena lemahnya integrasi nilai-nilai nasionalisme dalam kurikulum pendidikan modern, termasuk di era Kurikulum Merdeka saat ini. Penelitian dari Aprilia (2022) juga menyatakan bahwa meskipun Kurikulum Merdeka menawarkan kebebasan belajar dan penyesuaian materi sesuai konteks lokal, belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai sarana penanaman nilai nasionalisme secara terstruktur dan sistematis.

Berangkat dari persoalan tersebut, perlu dilakukan eksplorasi lebih mendalam terhadap kontribusi historis dan nilai-nilai kebangsaan yang diwariskan oleh lembaga-lembaga pendidikan nasional seperti Taman Siswa, Muhammadiyah, INS Kayu Tanam, dan Diniyah Padang Panjang. Eksplorasi ini bertujuan untuk menggali kembali jiwa nasionalisme yang pernah ditanamkan melalui sistem pendidikan mereka, sekaligus merumuskan relevansinya dalam konteks sistem pendidikan nasional pasca-kemerdekaan hingga implementasi Kurikulum Merdeka saat ini. Hal ini sejalan dengan gagasan Putri et. al.,(2024) mengenai pentingnya pendidikan karakter sebagai fondasi utama dalam membangun kepribadian warga negara yang berkarakter kuat, sekaligus memperkuat rasa cinta tanah air di tengah tantangan globalisasi.

Hal ini penting untuk dilakukan karena dapat memberikan kontribusi ilmiah sekaligus praktis bagi pengembangan pendidikan nasional yang berbasis karakter kebangsaan. Tulisan ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam penyusunan kebijakan pendidikan nasional yang lebih berpihak kepada nilai-nilai keindonesiaan serta memperkuat jati diri bangsa di tengah era modernisasi yang serba terbuka. Dengan mengkaji kontribusi lembaga-lembaga pendidikan nasional masa lalu dan merelevansikannya dengan kondisi pendidikan saat ini, diharapkan tercipta formulasi kebijakan pendidikan yang responsif terhadap perkembangan zaman, dan tetap berpijak pada semangat nasionalisme sebagaimana yang telah diwariskan oleh para pendiri bangsa melalui lembaga-lembaga pendidikannya

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) yang bertujuan untuk menghimpun, mengkaji, dan menganalisis berbagai literatur, hasil penelitian, jurnal ilmiah, serta dokumen-dokumen relevan yang berkaitan dengan konsep, peran, dan strategi lembaga pendidikan dalam membentuk jiwa nasionalisme di kalangan peserta didik.

Library research dipilih karena memungkinkan untuk memperoleh data sekunder dari berbagai sumber teoretis dan empiris, sehingga dapat menyusun kajian konseptual yang komprehensif mengenai pentingnya pendidikan berjiwa nasional dalam konteks pembangunan karakter bangsa. Menurut Ramdhan (2021), penelitian kepustakaan merupakan suatu rangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data dari berbagai literatur untuk dianalisis secara kritis, sistematis, dan mendalam guna memperoleh landasan teori yang kuat dalam menjawab permasalahan penelitian.

Dalam proses pengumpulan data, artikel jurnal nasional dan internasional, serta regulasi pendidikan yang berkaitan dengan penguatan nilai-nilai kebangsaan dalam lembaga pendidikan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik *content analysis* atau analisis isi, yaitu suatu teknik untuk mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menarik kesimpulan dari isi teks atau dokumen yang berkaitan dengan variabel penelitian (Pratama pi al., 2021). Teknik ini membantu untuk mengungkap tema-tema utama terkait strategi pembentukan jiwa nasionalisme, pendekatan pendidikan karakter, serta peran institusi pendidikan dalam menanamkan nilai-nilai kebangsaan berdasarkan temuan-temuan penelitian sebelumnya.

Beberapa penelitian yang dijadikan acuan dalam analisis ini di antaranya adalah studi yang dilakukan oleh Nanta dan Firmansyah (2024) dalam *Jurnal Penelitian dan pengabdian*, yang menyatakan bahwa lembaga pendidikan memiliki tanggung jawab moral dalam membangun identitas nasional melalui kurikulum berbasis nilai-nilai kebangsaan. Selain itu, penelitian oleh Rhomadhoni dan Sukartono (2025) dalam *Jurnal Penelitian Pendidikan* menegaskan integrasi pendidikan karakter berlandaskan nasionalisme dalam kegiatan pembelajaran dapat meningkatkan rasa cinta tanah air di kalangan pelajar. Dengan demikian, Tulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual berupa sintesis gagasan dan rekomendasi strategis tentang peran ideal lembaga pendidikan yang berjiwa nasional dalam konteks pendidikan Indonesia masa kini dan mendatang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah dan Peran Pendidikan Sebelum Kemerdekaan

Sebelum meraih kemerdekaan, bangsa Indonesia telah berusaha keras untuk memulihkan kehormatan dan martabatnya sebagai bangsa yang berdaulat, sekaligus menyadari haknya dalam memperoleh pendidikan yang layak demi kemajuan dan kecerdasan bangsa. Pada dasarnya, pendidikan bertujuan untuk membangun bangsa dengan cara membentuk manusia seutuhnya. Sejarah pendidikan sejatinya telah berlangsung jauh sebelum manusia mengenal sistem tulisan. Dalam pengertian sederhana, pendidikan merupakan proses pewarisan budaya, kepercayaan, mata pencaharian, serta nilai-nilai kehidupan lainnya. Pada masa sebelum berkembangnya literasi, tujuan utama pendidikan masih sangat mendasar, yaitu menyiapkan generasi muda agar mampu bertahan hidup dan beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Namun, seiring dengan berkembangnya pengetahuan serta masuknya pengaruh budaya luar, bentuk dan isi pendidikan pun menjadi semakin beragam dan kompleks.

Pada awalnya pendidikan di Indonesia sebelum masa pergerakan nasional, semulanya hanya untuk kalangan bangsawan dan agamawan. Sebelum kemerdekaan Indonesia, terdapat beberapa Lembaga Pendidikan yang Berjiwa Nasional yang didirikan oleh para tokoh penggerak untuk menanamkan semangat kebangsaan, cinta tanah air, dan perlawanan terhadap penjajah yaitu:

A. Taman Siswa.

Taman Siswa berdiri pada 3 Juli 1922 di Yogyakarta oleh Ki Hajar Dewantara. Kehadiran lembaga ini sebagai wujud perlawanan terhadap sistem pendidikan kolonial yang kala itu bersifat tidak adil dan penuh diskriminasi. Taman Siswa mengutamakan pentingnya

pendidikan yang membebaskan lahir dan batin, selaras dengan kodrat alam, budaya, serta kebutuhan masyarakat Indonesia (Ndoa & Hulu, 2023). Tujuan utama lembaga ini adalah membentuk manusia yang merdeka lahir batin, yaitu individu yang mampu mengembangkan dirinya secara mandiri demi tercapainya kebahagiaan, kedamaian, dan kesejahteraan masyarakat secara adil dan seimbang.

Pada zamannya, Taman Siswa menyediakan berbagai jenjang pendidikan, mulai dari Taman Indriya, Taman Anak, Taman Muda, Taman Dewasa, Taman Dewasa Raya atau Taman Madya, hingga Taman Guru. Selain itu, sistem pendidikan yang diterapkan di Taman Siswa secara tegas menolak praktik indoktrinasi dan hukuman fisik yang saat itu lazim diterapkan di sekolah-sekolah kolonial. Ki Hajar Dewantara memperkenalkan asas *among*, yang terkenal dengan semboyan *ing ngarso sung tulada, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani*, yang bermakna di depan memberi keteladanan, di tengah membangun semangat, dan di belakang memberikan dorongan.

Taman Siswa memberikan pengajaran ilmu pengetahuan, menanamkan nilai-nilai nasionalisme, kemandirian, serta pelestarian budaya bangsa, yang kemudian menjadi pondasi utama dalam sistem pendidikan nasional Indonesia. Sistem pembelajaran di lembaga ini bersifat formal, melainkan juga menitikberatkan pada pendekatan budaya dan pembentukan karakter peserta didik. Ki Hajar Dewantara menegaskan bahwa pendidikan harus berpihak kepada anak dan menghindari unsur pemaksaan. Oleh karena itu, kurikulum yang diterapkan disusun secara fleksibel dan kontekstual, menyesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat pada masanya.

Pendidikan di Taman Siswa turut memperjuangkan nilai-nilai demokrasi, kesetaraan, serta penghargaan terhadap martabat kemanusiaan, yang sejalan dengan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia. Pada masa penjajahan, keberadaan Taman Siswa menjadi lambang perjuangan intelektual masyarakat pribumi sekaligus sarana untuk menumbuhkan semangat nasionalisme. Pengaruh yang ditorehkan oleh Taman Siswa begitu besar, hingga lembaga ini dianggap sebagai salah satu peletak dasar sistem pendidikan nasional yang kita kenal saat ini, yang menjunjung tinggi keberagaman, kearifan lokal, serta kebebasan berpikir dan berkreasi.

B. Muhammadiyah

Muhammadiyah didirikan pada 18 November 1912 di Yogyakarta oleh K.H. Ahmad Dahlan sebagai sebuah gerakan pembaruan dalam Islam yang menempatkan pendidikan sebagai salah satu prioritas utamanya. Sistem pendidikan Muhammadiyah berpedoman pada Al-Qur'an dan Sunnah, dengan visi membentuk insan muslim yang berakhlak mulia, cerdas, serta mampu memberikan manfaat bagi masyarakat (Setiawan & Maunah, 2023). Ciri khas Muhammadiyah terletak pada integrasi nilai-nilai keislaman dengan ilmu pengetahuan umum. Muhammadiyah juga membangun jaringan pendidikan mulai dari jenjang dasar hingga perguruan tinggi, yang bertujuan melahirkan generasi yang religius, modern, dan memiliki jiwa nasionalisme.

Seiring waktu, Muhammadiyah terus memperluas jaringan lembaga pendidikannya, mencakup jenjang pendidikan dasar, menengah, hingga perguruan tinggi. Setiap lembaga tersebut dirancang untuk melahirkan generasi yang memiliki keseimbangan antara kecakapan intelektual, moral, dan spiritual. Sistem pendidikan Muhammadiyah dikenal dengan pendekatan integratif, yakni memadukan nilai-nilai keislaman dengan ilmu pengetahuan modern. Selain itu, lembaga pendidikan di bawah naungan Muhammadiyah juga menaruh perhatian besar terhadap penanaman nilai kebangsaan serta pembentukan karakter peserta didik, dengan harapan dapat mencetak individu yang mandiri, kompetitif, dan mampu berperan aktif dalam pembangunan bangsa.

Sampai saat ini, Muhammadiyah telah mengelola ribuan lembaga pendidikan yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia, mulai dari tingkat taman kanak-kanak, sekolah dasar,

sekolah menengah, hingga perguruan tinggi. Lembaga-lembaga yang berfungsi sebagai tempat penyelenggaraan pendidikan dan transfer ilmu pengetahuan, serta sebagai pusat pembinaan moral, sosial, dan nilai-nilai kebangsaan. Peran Muhammadiyah dalam dunia pendidikan menjadi salah satu pilar penting dalam perjalanan sejarah pendidikan nasional, karena berhasil mendorong lahirnya masyarakat yang terdidik, berpegang teguh pada nilai-nilai keislaman, serta mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman.

C. INS Kayu Tanam.

Ruang Pendidikan INS Kayu Tanam didirikan pada 31 Oktober 1926 oleh Mohammad Sjafei di Kayu Tanam, Sumatera Barat. Lembaga ini hadir sebagai bentuk perlawanan terhadap sistem pendidikan kolonial Belanda yang bersifat diskriminatif dan terbatas bagi kalangan pribumi. INS Kayu Tanam dikenal dengan penerapan sistem *sekolah kerja*, yaitu metode pendidikan dilakukan di dalam ruang kelas, dan juga melalui kegiatan langsung di lingkungan sekitar (Rahayu, 2020). Prinsip dasar pendidikan di INS Kayu Tanam berorientasi pada pengembangan pola pikir logis, pemberdayaan masyarakat, serta pembentukan kemandirian peserta didiknya.

INS Kayu Tanam mengembangkan konsep pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai kebangsaan, kemandirian, dan keterampilan hidup. Melalui kurikulum yang disusun secara mandiri, lembaga ini memberikan pengajaran pengetahuan umum keagamaan, membekali siswa dengan keterampilan teknis dan kemampuan kepemimpinan. Dalam pelaksanaannya, INS Kayu Tanam menerapkan prinsip pendidikan yang mengombinasikan teori dan praktik, di mana para siswa mengikuti pembelajaran di dalam kelas, serta aktif dalam berbagai kegiatan produktif seperti bercocok tanam, membuat kerajinan tangan, dan mempelajari keterampilan teknik. Tujuan dari metode ini adalah membentuk peserta didik yang mandiri, inovatif, dan mampu menghadapi tantangan sosial serta ekonomi di lingkungannya. Di samping itu, INS Kayu Tanam turut menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan semangat nasionalisme, dengan harapan dapat melahirkan generasi muda yang peduli terhadap masa depan bangsanya dan memiliki jiwa perjuangan dalam menghadapi penjajahan.

Sampai saat ini, INS Kayu Tanam tetap diakui sebagai salah satu pelopor pendidikan alternatif berbasis nasional di Indonesia. Konsep pendidikan yang dirancang oleh Mohammad Sjafei telah berhasil melahirkan lulusan yang unggul dalam bidang akademik, tetapi juga terampil secara praktis dan memiliki kepedulian sosial. Kiprah INS Kayu Tanam dalam sejarah pendidikan di Indonesia menjadi bukti nyata bahwa lembaga pendidikan milik pribumi mampu berdiri secara mandiri serta memberikan kontribusi signifikan dalam membangun masyarakat yang berpengetahuan luas, berkarakter kuat, dan memiliki semangat nasionalisme.

D. Diniyah Puteri Padang Panjang

Diniyah Puteri Padang Panjang merupakan lembaga pendidikan yang didirikan pada 1 November 1923 oleh Rahmah El Yunusiyah di Padang Panjang. Lembaga ini dikenal sebagai pelopor pendidikan khusus perempuan di Indonesia, dengan tujuan membentuk perempuan yang berakhlak mulia, terampil, dan mampu berperan sebagai pendidik di lingkungan keluarga maupun masyarakat (Zamhari et al., 2023). Dalam perjalanannya, Diniyah Puteri menerapkan kurikulum terpadu yang mencakup pendidikan agama, keterampilan hidup, kepemimpinan, dan pelajaran umum. Seluruh proses pembelajaran diselenggarakan melalui sistem pendidikan berbasis asrama. Sistem tersebut tidak hanya membekali peserta didik dengan pengetahuan intelektual, tetapi juga menanamkan nilai-nilai kedisiplinan, tanggung jawab, serta kemandirian sejak usia dini. Lembaga ini lahir dari ketidakpuasan Rahmah El Yunusiyah terhadap sistem *Diniyah School* yang didirikan oleh kakaknya, di mana sekolah tersebut masih menerapkan sistem *Coedukasi* dengan menyatukan siswa laki-laki dan perempuan dalam satu ruang kelas

Pada pelaksanaannya, Diniyah School saat itu lebih banyak diisi oleh siswa laki-laki, sehingga peluang pendidikan bagi kaum perempuan menjadi sangat terbatas. Melalui pendirian Diniyah Puteri, Rahmah El Yunusiyah berupaya menciptakan ruang pendidikan khusus bagi perempuan agar dapat memperoleh pendidikan yang layak, bermartabat, dan setara. Kehadiran lembaga ini menjadi salah satu tonggak penting dalam sejarah perjuangan pendidikan serta emansipasi perempuan Muslim di Indonesia. Hingga kini, Diniyah Puteri tetap eksis dengan berbagai unit pendidikan aktif, seperti Taman Kanak-Kanak Rahmah El Yunusiyah, Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama Diniyah Puteri, Kuliyyatul Mu'allimat El Islamiyah, dan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah. Peran aktif dan komitmennya dalam memberdayakan perempuan melalui jalur pendidikan menjadikan Diniyah Puteri sebagai salah satu lembaga pendidikan Islam yang paling berpengaruh dalam mendorong kemajuan perempuan di bidang sosial dan keagamaan.

Transformasi Sistem Pendidikan Pasca-Kemerdekaan

Pada masa awal kemerdekaan, tepatnya tanggal 17 Agustus 1945, kegiatan pembelajaran di sekolah lebih diarahkan untuk menumbuhkan semangat nasionalisme dan rasa cinta tanah air. Proklamasi kemerdekaan menjadi peristiwa bersejarah yang menandai berakhirnya penjajahan di Indonesia sekaligus membuka babak baru dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk di bidang pendidikan. Kondisi ini mendorong perlunya perubahan sistem pendidikan agar selaras dengan suasana kemerdekaan yang baru tercipta. Oleh sebab itu, dibutuhkan upaya perencanaan terhadap sistem pendidikan dan pengajaran yang sebelumnya telah dipersiapkan pada masa-masa akhir penjajahan Jepang, yang kemudian menjadi acuan awal dalam pelaksanaan pendidikan di Indonesia (Fadli & Kumalasari, 2019).

Pasca kemerdekaan, sistem pendidikan nasional di Indonesia mengalami berbagai perubahan yang sejalan dengan dinamika politik, sosial, dan perkembangan pendidikan. Transformasi yang terjadi bersifat fundamental, karena menyangkut penyesuaian kebijakan pendidikan agar selaras dengan dasar negara serta cita-cita bangsa Indonesia. Pada masa itu, sejumlah perubahan penting mulai diterapkan dalam sistem pendidikan nasional, di antaranya adalah sebagai berikut;

A. Pada masa awal kemerdekaan (1945-1950)

Pada periode ini, pemerintah mulai merancang sistem pendidikan nasional yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu pijakan pentingnya adalah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran (Aisy & Hudaída, 2021). Peraturan ini menjadi payung hukum pertama yang secara sistematis mengatur prinsip-prinsip dasar pendidikan di Indonesia setelah kemerdekaan. Kurikulum yang diterapkan pada masa tersebut masih berfokus pada penguasaan literasi dasar, seperti kemampuan membaca, menulis dalam Bahasa Indonesia, berhitung, serta penanaman nilai-nilai kebangsaan guna membangun identitas nasional yang kokoh. Pendidikan diarahkan untuk mencetak warga negara yang cerdas, berkepribadian, dan memiliki kecintaan terhadap tanah air.

Dalam pelaksanaannya, sistem pendidikan dibagi ke dalam beberapa jenjang dan jalur, meliputi Pendidikan Rendah, Pendidikan Guru, Pendidikan Umum, Sekolah Kejuruan, Pendidikan Teknik, Pendidikan Tinggi, Pendidikan Tinggi Republik, dan Pendidikan Agama. Pembagian ini menunjukkan upaya pemerintah sejak awal kemerdekaan untuk mengakomodasi berbagai kebutuhan pendidikan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan tuntutan pembangunan nasional. Meskipun menghadapi sejumlah keterbatasan, masa ini menjadi landasan penting bagi arah pembentukan sistem pendidikan Indonesia yang merdeka, berjiwa nasionalis, dan berkeadilan.

B. Masa Orde Lama (1950-1966)

Pada periode ini, arah pendidikan difokuskan untuk membentuk warga negara yang berjiwa sosialis dan berlandaskan Pancasila. Beberapa kurikulum yang diterapkan di

antaranya, pertama adalah perencanaan pembelajaran tahun 1947 (*leer plan*) yang berupaya menyesuaikan sistem pendidikan kolonial ke dalam kerangka pendidikan nasional. Kedua, rencana pembelajaran terurai tahun 1952, yang lebih menegaskan peran guru sebagai pusat proses pembelajaran. Ketiga, kurikulum tahun 1964 yang memprioritaskan pemenuhan kebutuhan masyarakat serta penguatan kecerdasan jasmani, moral, dan seni (Setiawan & Maunah, 2023).

Perubahan-perubahan kurikulum ini mencerminkan adanya perkembangan pemikiran pendidikan yang mengikuti arah ideologi dan tuntutan bangsa. Perencanaan pembelajaran 1947 menjadi tonggak awal transisi dari sistem pendidikan kolonial menuju sistem pendidikan nasional yang merdeka. Rencana pembelajaran tahun 1952 menitikberatkan pada kewenangan dan tanggung jawab guru dalam mengarahkan jalannya proses belajar, sehingga guru berperan sebagai tokoh sentral dalam membentuk karakter peserta didik. Sementara itu, kurikulum 1964 menunjukkan pergeseran orientasi pendidikan yang lebih menyeluruh, tidak hanya menitikberatkan aspek akademik, tetapi juga membina kemampuan jasmani, moral, dan seni sebagai bagian dari pendidikan manusia secara utuh.

Pada masa ini, sistem pendidikan turut dipengaruhi oleh ideologi sosialisme yang diusung Presiden Soekarno. Pasal 30 UUDS 1950 menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak memperoleh pendidikan serta kebebasan dalam memilih dan menyelenggarakan pengajaran di bawah pengawasan negara. Ketentuan ini mencerminkan semangat demokrasi dalam sistem pendidikan, di mana masyarakat diberi kesempatan untuk berpartisipasi, namun tetap dalam koridor pengawasan pemerintah guna memastikan pendidikan berjalan sesuai arah pembangunan bangsa. Tujuan utama pendidikan pada masa ini ialah membentuk warga negara Indonesia yang sosialis, berakhlak, berjiwa Pancasila, dan bertanggung jawab dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Meskipun situasi politik pada periode tersebut penuh dinamika, bidang pendidikan tetap menjadi alat strategis dalam menanamkan semangat nasionalisme, kebersamaan, serta cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

C. Masa Orde Baru

Pada periode ini, pendidikan difungsikan sebagai sarana utama untuk mendukung pembangunan nasional, dengan penekanan pada aspek efisiensi dan pemerataan. Beberapa kurikulum yang diterapkan meliputi Kurikulum 1975 yang berorientasi pada pendekatan tujuan instruksional, Kurikulum 1984 yang memperkenalkan metode Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA), dan Kurikulum 1994 yang bertujuan menyeimbangkan pendekatan antara isi materi dan proses pembelajaran (Zamhari et al., 2023). Ketiga kurikulum tersebut mencerminkan upaya pemerintah dalam menyesuaikan sistem pendidikan nasional agar sejalan dengan tuntutan pembangunan sekaligus meningkatkan mutu proses pembelajaran.

Pendekatan tujuan instruksional memudahkan guru dalam merancang proses pembelajaran secara terukur, sedangkan penerapan CBSA mendorong perubahan paradigma dari model pembelajaran berpusat pada guru menjadi pembelajaran partisipatif yang aktif melibatkan siswa. Kurikulum 1994 kemudian berupaya mengintegrasikan kedua pendekatan tersebut, sehingga peserta didik tidak hanya memahami materi pelajaran, tetapi juga terampil berpikir kritis dan aktif berpartisipasi dalam proses belajar.

Pada masa ini pula, program wajib belajar enam tahun mulai diberlakukan dan kemudian diperluas menjadi sembilan tahun. Pemerintah membangun berbagai fasilitas sekolah baru dan meningkatkan jumlah guru berstatus pegawai negeri sipil guna menjamin pemerataan akses pendidikan dasar bagi seluruh anak. Meskipun upaya ini berhasil meningkatkan angka partisipasi sekolah, berbagai tantangan tetap muncul. Sistem pendidikan saat itu masih sangat birokratis, terpusat di pemerintah pusat, dan cenderung membatasi kreativitas guru dalam merencanakan metode pembelajaran yang sesuai dengan kondisi setempat. Kurikulum nasional yang diterapkan kurang mempertimbangkan keberagaman budaya serta kebutuhan

lokal masing-masing daerah, sehingga menimbulkan kesenjangan kualitas pendidikan antardaerah.

Sistem evaluasi pendidikan lebih banyak berfokus pada pencapaian nilai akademik daripada pengembangan karakter, keterampilan hidup, dan penanaman semangat kebangsaan. Akibatnya, meskipun secara kuantitatif terjadi peningkatan dalam akses pendidikan, kualitas pendidikan pada masa Orde Baru belum sepenuhnya merata dan kurang adaptif terhadap perkembangan zaman.

D. Masa Reformasi (1998-2013)

Reformasi di bidang pendidikan ditandai dengan diberlakukannya desentralisasi melalui penerapan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) tahun 2004 serta Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) tahun 2006. Kebijakan ini memfokuskan perhatian pada penguatan kompetensi peserta didik dan memberikan kebebasan bagi setiap satuan pendidikan untuk mengembangkan kurikulum lokal sesuai dengan kebutuhan masing-masing (Datumula, 2020). Perubahan tersebut menandai pergeseran signifikan dari sistem pendidikan yang sebelumnya bersifat terpusat menjadi lebih otonom, di mana sekolah memiliki kewenangan untuk menyesuaikan isi serta metode pembelajaran sesuai karakteristik peserta didik dan kondisi lingkungan sekitar.

Tujuan dari kebijakan ini adalah menjadikan pendidikan lebih relevan, kontekstual, serta berorientasi pada pengembangan potensi individu secara optimal. Penekanan terhadap kompetensi peserta didik dan kebebasan sekolah dalam merancang kurikulum lokal merupakan strategi penting dalam membangun sistem pendidikan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Melalui pendekatan ini, sekolah berperan sebagai pelaksana kebijakan pemerintah pusat, dan juga menjadi agen perubahan yang aktif menyesuaikan proses pembelajaran dengan situasi sosial, budaya, ekonomi, dan geografis daerahnya.

Langkah ini memungkinkan proses pendidikan menjadi lebih dekat dengan realitas kehidupan peserta didik, sehingga kegiatan belajar tidak terlepas dari konteks lingkungan tempat mereka tinggal. Di sisi lain, fokus terhadap pengembangan kompetensi mendorong lahirnya individu yang menguasai pengetahuan, memiliki keterampilan praktis, sikap positif, serta karakter yang sesuai dengan tantangan baik di tingkat lokal maupun global. Kemampuan berpikir kritis, kolaboratif, kreatif, dan komunikatif menjadi bagian dari tujuan utama pendidikan nasional. Dengan demikian, kebijakan ini menjadi fondasi penting bagi terwujudnya pendidikan yang inklusif, adil, relevan, serta berorientasi pada penguatan karakter bangsa, sekaligus membuka peluang menuju pembelajaran sepanjang hayat (*lifelong learning*).

E. Masa kontemporer (Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka)

Kurikulum 2013 menitikberatkan pada penguatan pendidikan karakter serta penerapan pendekatan ilmiah dalam proses pembelajaran. Seiring dengan terjadinya pandemi Covid-19, pemerintah mulai memberlakukan Kurikulum Merdeka yang menawarkan fleksibilitas lebih luas bagi guru dan sekolah. Kurikulum ini menekankan penguatan proyek-proyek berbasis Profil Pelajar Pancasila serta penerapan model pembelajaran berdiferensiasi (Datumula, 2020). Pendekatan yang diterapkan dalam Kurikulum Merdeka memberikan ruang lebih besar kepada sekolah dan pendidik untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kondisi siswa, lingkungan lokal, serta potensi sumber daya yang tersedia.

Pembelajaran berdiferensiasi memberikan kesempatan kepada guru untuk memberikan layanan belajar yang sesuai dengan kemampuan, minat, dan gaya belajar masing-masing peserta didik, sehingga setiap anak dapat berkembang secara maksimal. Di samping itu, proyek berbasis Profil Pelajar Pancasila dirancang untuk menanamkan nilai-nilai seperti gotong royong, kemandirian, berpikir kritis, dan kebhinekaan global, yang menjadi landasan penting dalam membentuk karakter bangsa di era globalisasi saat ini.

Kurikulum Merdeka juga mendorong pemanfaatan teknologi serta penerapan pendekatan lintas disiplin dalam proses belajar mengajar, sehingga pendidikan menjadi lebih kontekstual dan sesuai dengan perkembangan dunia nyata. Dengan demikian, kurikulum pada masa kontemporer ini mencerminkan pergeseran paradigma pendidikan menuju sistem yang lebih humanistik, fleksibel, dan berpusat pada peserta didik, tanpa meninggalkan nilai-nilai kebangsaan dalam menghadapi tantangan global.

Dari berbagai uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa lembaga pendidikan berjiwa nasional di Indonesia memegang peranan penting dalam membentuk karakter, identitas, dan kepribadian bangsa sejak masa sebelum kemerdekaan hingga saat ini.

SIMPULAN DAN SARAN

Lembaga-lembaga pendidikan yang berjiwa nasional telah terbukti memiliki peran strategis dalam membentuk karakter dan jati diri bangsa Indonesia, sebelum kemerdekaan sampai era modern saat ini. Institusi seperti Taman Siswa, Muhammadiyah, INS Kayu Tanam, dan Diniyah Puteri Padang Panjang tidak hanya berperan sebagai pusat pendidikan, tetapi juga menjadi wadah perjuangan intelektual dan semangat nasionalisme. Pasca kemerdekaan, sistem pendidikan Indonesia turut mengalami berbagai perubahan kurikulum serta kebijakan yang mencerminkan dinamika sosial-politik di dalam negeri.

Perubahan tersebut menegaskan bahwa pendidikan merupakan sarana utama dalam membentuk warga negara yang cerdas, berkarakter, dan berkomitmen terhadap nilai-nilai kebangsaan. Oleh karena itu, lembaga pendidikan nasional perlu terus diperkuat dan diarahkan agar mampu menghadapi tantangan globalisasi dan digitalisasi, sekaligus tetap menjadi pilar penting dalam mewujudkan bangsa yang merdeka, bermartabat, dan berkepribadian kuat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisy, S. R., & Hudaidah, H. (2021). Pendidikan Indonesia di era Awal Kemerdekaan Sampai Orde Lama. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3(2), 569-577.
- Aprilia, N. E. A. (2022). Implementasi Kebijakan Kurikulum Merdeka Belajar dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMK Muhammadiyah 1 Semarang (Undergraduate thesis). *Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Semarang*
- Datumula, S. (2020). Peraturan Kebijakan Pendidikan di Indonesia pada Masa Orde Lama, Orde Baru, Reformasi, dan Kabinet Kerja. *Moderasi: Jurnal Studi Ilmu Pengetahuan Sosial*, 1(2), 56-78
- Fadli, M. R., & Kumalasari, D. (2019). Sistem Pendidikan Indonesia Pada Masa Orde Lama (Periode 1945-1966). *Agastya: Jurnal Sejarah dan Pembelajarannya*, 9(2), 157-171.
- Fauzi, K. R. (2022). Mohammad Sjafe'atTM I: Peran Intelektualitasnya dalam Mengembangkan Pendidikan di Sumatera Barat Melalui Ruang Pendidik Ins Kayutanam. *Siginjai: Jurnal Sejarah*, 2(1), 45-53. <https://doi.org/10.22437/js.v2i1.18047>
- Fitrianto, E. M., Nugroho, M. A., & Birsyada, M. I. (2025). Kontribusi Taman Siswa dalam Mengembangkan Model Pendidikan dan Pengajaran Pada Era Kolonial. *Estoria: Journal of Social Science and Humanities*, 5(2), 792-814.
- Fitroh, I., & Rosidi, M. I. (2023). Taman Siswa: Pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam Tinjauan Historis. *Journal on Education*, 5(2), 2677-2688.
- Khosin, K. (2023). Reformasi Pendidikan Muhammadiyah di Indonesia. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 17(2), 1177-1187.
- Mindani, M. (2022). *Pemikiran Pendidikan M. Syafe'i Perspektif Pendidikan Islam*. Bengkulu: Elmarkaz.

- Muthi, I., Saidah, S., & Alam, D. R. M. (2025). Pendidikan Islam Modern Perspektif Zainuddin Labay El-Yunsy Dan Mohammad Syafe'i. *Turabian: Jurnal Pendidikan Islam*, 3(1), 33-48.
- Nanta, A. A., & Fimansyah, W. (2024). Peran Guru dalam Membentuk Identitas Nasional Peserta Didik Melalui Implementasi Budaya Sekolah. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian*, 1(3), 243-251.
- Ndoa, P. K., & Hulu, S. (2023). Pendidikan Sebagai Upaya Pemerdekaan Manusia. *Jurnal Magistra*, 1(1), 53-65. <https://doi.org/10.62200/magistra.v1i1.45>
- Nurwahyuni, K., & Hudaidah, H. (2021). Sejarah Sistem Pendidikan di Indonesia dari Masa ke Masa. *Berkala Ilmiah Pendidikan*, 1(2), 53-59.
- Pratama, B. I., Anggraini, C., Pratama, M. R., Illahi, A. K., & Ari, D. P. S. (2021). *Metode analisis isi (Metode penelitian populer ilmu-ilmu sosial)*. Unisma Press.
- Putri, M. F. J. L., Mumung, K. E., & Sulistiawati, D. (2024). Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Upaya Membangun Karakter Kebangsaan di Era Globalisasi. *Academy of Social Science and Global Citizenship Journal*, 4(2), 73-79. <https://doi.org/10.47200/aossagcj.v4i2.2717>
- Ramdhan, M. (2021). *Metode penelitian*. Cipta Media Nusantara
- Rhomadhoni, N. Q. A. N., & Sukartono, S. (2025) Pembentukan Karakter Cinta Tanah Air Melalui Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Bagi Siswa Sekolah Dasar. *Jurnal Penelitian Pendidikan*, 25(1).
- Setiawan, A. N. B., & Maunah, B. (2023). Dasar Dasar History Sistem Pendidikan Nasional. *Edudikara: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 8(2), 51-63.
- Setiawan, A. N. B., & Maunah, B. (2023). Ilmu Pendidikan Merupakan Suatu Dasar Dasar History Sistem Pendidikan Nasional. *Cendekia: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*, 17(1), 69-84. <https://doi.org/10.30957/cendekia.v17i1.816>
- Shobirin, M. A., Rosyadi, R. N., & Sari, E. F. (2025). *Tantangan Dan Problematika Masyarakat Modern*. Cahya Ghani Recovery.
- Sofyan, S. (2022). Eksistensi Pendidikan dan Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia Pra dan Pasca Kemerdekaan. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 16(1), 344-356. <http://dx.doi.org/10.35931/aq.v16i1.856>
- Susanto, N. H., & Kholis, N. (2022). *Quo Vadis Pendidikan dan Gerakan Sosial Agama Lokal di Indonesia*. Penerbit NEM.
- Wati, L. A., & Asri, Z. (2021). Relevansi Pemikiran Pendidikan Mohammad Sjafei pada Pelaksanaan Pendidikan di INS Kayutanam (2006-2018). *Jurnal Kronologi*, 3(1), 156-163. <https://doi.org/10.24036/jk.v3i1.124>
- Zamhari, Z., Noviani, D., & Zainuddin, Z. (2023). Perkembangan Pendidikan di Indonesia. *Morfologi: Jurnal Ilmu Pendidikan, Bahasa, Sastra dan Budaya*, 1(5), 01-10. <https://doi.org/10.61132/morfologi.v1i5.42>